

## **Pengaruh Keterlibatan *Food and Agriculture Organization (FAO)* dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian Pasca-Konflik Krisis Pangan Etnis Rohingya di Myanmar**

**Dzikiara Pesona Sadewa**

Pasca Sarjana Hubungan Internasional ,Universitas Padjadjaran

Email: dzikiara\_kiki@yahoo.co.id

**Dudy Heryadi**

Pasca Sarjana Hubungan Internasional ,Universitas Padjadjaran

Email: dudy.heryadi@unpad.ac.id

**Taufik Hidayat**

Pasca Sarjana Hubungan Internasional ,Universitas Padjadjaran

Email: taufik\_hidayat\_hi@yahoo.com

### **Abstrak**

Artikel ini membahas bagaimana pengaruh keterlibatan *Food and Agriculture Organization (FAO)* dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian pasca konflik krisis pangan etnis Rohingya di Myanmar dimana ketika adanya konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dan Rakhine di tahun 2012. Konflik tersebut pada akhirnya berdampak terhadap krisis pangan khususnya di wilayah Rakhine yang di tinggali oleh etnis Rohingya, padahal pada kenyataannya wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang potensial dalam peningkatan sektor pertanian di Myanmar namun di sisi lain wilayah tersebut juga bukan hanya wilayah yang rawan konflik namun juga wilayah yang rawan akan bencana alam. Metode di dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif kemudian di analisis secara deskriptif. Selain itu juga dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan cara melalui penelusuran studi pustaka baik dari berita *online* maupun berita resmi dari pemerintah Myanmar dan berita resmi yang dikeluarkan dari FAO. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya keterlibatan FAO dengan cara melakukan kerja sama dengan pemerintah Myanmar dalam mengoptimisasi sektor pertanian di wilayah Rakhine menjadi cara yang efektif dalam memberikan pengaruhnya terhadap etnis Rohingya yang tinggal di wilayah Rakhine dimana dengan upaya peningkatan produktivitas pertanian di wilayah konflik tersebut dapat mengurangi ketergantungan bantuan dan dapat meningkatkan ketersediaan pangan sehingga dapat mengurangi korban yang kelaparan dan krisis pangan yang di alami oleh etnis Rohingya di Myanmar.

**Kata kunci:** FAO, Rohingya, Myanmar, pertanian, krisis pangan

### **Abstract**

*This article discusses how the influence of the involvement of the Food and Agriculture Organization (FAO) in efforts to increase agricultural productivity in the aftermath of the Rohingya ethnic food crisis conflict in Myanmar, when there was a conflict between the Rohingya and Rakhine ethnic groups in 2012. The conflict ultimately affected the food crisis especially in the Rakhine region inhabited by the Rohingya, whereas in fact the region has become one of the potential areas for increasing the agricultural sector in Myanmar but on the other hand the region is also not only a conflict-prone region but also a region prone to disaster. In writing this article using qualitative methods and then analyzed descriptively. In addition, in data collection techniques, researchers used a method of searching through library research both from online news and official news from the Myanmar government and official news excluded from FAO, the results of this study indicate that with FAO involvement by collaborating with the Myanmar government in optimizing the agricultural sector in the Rakhine region, it becomes an effective way of influencing*

*the Rohingya ethnic groups living in the Rakhine region where by increasing agricultural productivity in the region the conflict can reduce dependence on aid and can increase food availability so as to reduce starvation victims and the food crisis experienced by the Rohingya ethnic group in Myanmar*

**Keywords:** agriculture, FAO, food crisis, Myanmar, Rohingya

---

## PENDAHULUAN

Myanmar merupakan salah satu negara berkembang dengan populasi sekitar 50 juta jiwa dengan penduduk. Rata-rata merupakan keturunan dari ras Mongol dan selebihnya adalah keturunan dari India dan Pakistan. Penduduk Myanmar umumnya memiliki mata pencaharian dalam sektor pertanian. Negara ini juga dikenal dengan negara yang kaya akan sumber daya alam sehingga memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan lebih baik untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui sektor pertanian (Oxford Burma Alliance, 2016).

Namun, di balik potensinya yang luar biasa, negara ini memiliki permasalahan yang beragam, diantaranya adalah masalah konflik etnis yang berdampak terhadap aktivitas negara di sektor pertanian. Konflik tersebut menyebabkan sektor pertanian menjadi kurang produktif dan optimal dalam penerapannya. Selain itu, Myanmar memiliki hampir 153 etnis dengan budaya yang berbeda sehingga perbedaan tersebut menyebabkan pertentangan antaretnis. Kebijakan baru pada tahun 1982 yang disebut dengan *Burma Citizenship Law* (BCL) muncul ketika pemerintahan militer ketika menguasai Myanmar. Kebijakan ini telah dianggap merugikan etnis minoritas karena dianggap menjadi kontroversi beberapa pihak.

UU 1982 ini pada umumnya berisi bahwa kelompok etnis yang diakui secara resmi di Myanmar adalah sebanyak 135. Etnis yang tidak tercantum di sana secara tidak langsung adalah ilegal dan tidak diakui sebagai bagian dari Myanmar. Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang tidak tercantum di dalamnya. Padahal, jika dilihat dari sejarahnya, etnis ini telah lama

mendiami wilayah Arakan (nama kuno dari Rakhine) dan bahkan sudah ada di masa pemerintahan Min Saw Mun (1430-1434). Namun, setelah di masa kerajaan Mrauk U, mereka mulai diasingkan selama 24 tahun di Kesultanan Bengal. Hal itulah yang kemudian telah membawa para orang-orang Bengali untuk tinggal di Arakan dalam membantu menjalankan pemerintahan komunitas Muslim pertama di wilayah itu. Ketika itu juga di abad ke-17 populasi muslim ini terus mengalami sebuah peningkatan yang pesat tidak hanya di pemerintahan saja tetapi banyak juga keturunan muslim yang bermigrasi ke Arakan pada masa itu. Lalu di tahun 1785 kerajaan Burma dari selatan menyerang dan menguasai wilayah Arakan mereka mulai menerapkan politik diskriminasi dengan mengusir dan mengeksekusi orang-orang Muslim di Arakan yang tidak lain adalah etnis Rohingya yang berdampingan dengan etnis Rakhine yang mayoritas beragama Buddha.

Etnis Rakhine menganggap bahwa etnis Rohingya dapat lebih berkembang dibandingkan etnisnya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam aktivitas sehari-hari yang dilakukannya. Etnis ini juga sangat ahli dalam berdagang sehingga pertumbuhan ekonominya lebih pesat dibandingkan dengan etnis Rakhine. Etnis Rakhine juga dihadapkan dengan adanya Islamfobia yang mengakar kuat karena Myanmar merupakan negara yang dikelilingi oleh beberapa negara Islam seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia, sehingga menganggap bahwa etnis Rohingya, jika dibiarkan begitu saja, akan dapat mengancam stabilitas di Myanmar dan memicu diskriminasi secara

budaya, dieksploitasi secara ekonomi, dan disingkirkan oleh etnis Rohingya (Mohajan, 2018). Ketika dahulu pemerintah militer Burma (yang sekarang menjadi Myanmar) mengusulkan agar Provinsi Arakan ini dapat berganti nama menjadi Provinsi Rakhine, pemerintah ingin memberikan hak istimewa di dalam bidang politik dan ekonomi terhadap etnis Rakhine. Namun, hak istimewa itu tidak berlaku terhadap etnis Rohingya. Hak tersebut diberikan kepada etnis minoritas Rakhine yang beragama Buddha dengan jumlah penduduk kurang dari 10% sehingga negara bagian ini dinamakan Rakhine bukan Rohang. Oleh karena itulah etnis Rakhine berupaya menekan etnis mayoritas Rohingya, seperti membentuk gerakan anti-Muslim yang lebih banyak dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya (Smith, 2010 : 86).

Pada tahun 2012, terjadi sebuah konflik besar antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya, yang menjadi berita tataran dunia internasional. Konflik ini berawal dari adanya informasi bahwa ada pemerkosaan terhadap wanita non-muslim oleh pria muslim di Arakan. Hal tersebut berlanjut dengan tindakan pembalasan oleh warga non-muslim. Sepuluh pria Rohingya dibantai oleh etnis Rakhine ketika berada di dalam bus di Thandwe menuju Yangoon. Kemudian konflik antarkelompok tak terhindarkan sehingga terjadi saling bantai dan saling serang. Akibatnya, ratusan desa muslim dibakar dan dihancurkan. Konflik tersebut menyebabkan sekitar 850-1000-an warga tewas dan sekitar 90.000 ribu diusir secara paksa atau harus memilih untuk tetap berdiam dalam penderitaan. Peristiwa itu menyebabkan etnis Rohingya memilih mengungsi ke beberapa negara tetangga, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Bangladesh (Susetyo, Aryanto, & Wasti, 2013 : 40).

Pascakonflik tahun 2012, terjadi krisis pangan dan kelaparan dalam etnis Rohingya di Myanmar. Akses masuk bantuan yang sulit dan ketersediaan pangan

yang semakin sedikit menimbulkan banyak korban yang berjatuh akibat gizi buruk dan kelaparan. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat semakin hari semakin rendah, yang mana dari 3.183.330 jiwa, sekitar 85% penduduk menggantungkan hidupnya di dalam sektor pertanian. Produksi sektor pertanian terus menurun karena faktor perubahan iklim dan produktivitas pertanian yang kurang optimal, sehingga menyebabkan kurangnya produktivitas di negara ini, terutama di wilayah Rakhine yang dihuni oleh kedua etnis yang sedang berkonflik (Alfi, 2013).

*Food and Agriculture Organization* (FAO) merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang pertanian dan pangan yang dibentuk untuk mengatasi krisis pangan dan kelaparan di dunia. Organisasi ini juga bergerak dalam peningkatan kapasitas dan meningkatkan produksi bidang agrikultur, kehutanan, dan perikanan agar lebih produktif dan berkelanjutan, serta menekan angka kemiskinan di beberapa desa dan mengatasi kelaparan dan krisis pangan dengan menggunakan sistem pangan agar lebih efisien.

FAO melakukan investasi di bidang pertanian yang diperkirakan akan memiliki dampak lebih besar dalam mengurangi kemiskinan di perdesaan dengan menawarkan langsung berbagai program bagi masyarakat pedesaan untuk mendapatkan berbagai manfaat dari aset utama mereka seperti tanah dan tenaga kerja. Sementara itu FAO mulai ikut berkontribusi dan merangkul berbagai pihak yang dilakukannya dengan cara mengembangkannya agar produktivitas pertanian tersebut dapat menjadi sumber makanan yang di kembangkan agar terhindarnya krisis pangan dan juga menjadikan pertanian sebagai sumber utama dalam peningkatan pendapatan nasional di Myanmar (FAO, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa banyak etnis Rohingya yang mengalami kelaparan. Korban juga terus

berjatuhan. Oleh karena itu, penulis ingin menguraikan tentang bagaimana pengaruh keterlibatan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian pascakonflik krisis pangan etnis Rohingya di Myanmar.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dalam menjelaskan fenomena di atas. Penelitian yang pertama ditulis oleh Lisa Brooten & Yola Verbruggen dengan judul *Producing the News: Reporting on Myanmar's Rohingya Crisis* dari *Journal of Contemporary Asia*, diterbitkan oleh Taylor & Francis. Dalam penelitian tersebut para jurnalis yang berada di sana menjelaskan pernyataan bahwa banyak berita yang tersembunyi di balik krisis yang terjadi terhadap Rohingya di Myanmar. Hal tersebut disebabkan oleh akses yang begitu sulit dalam pengiriman makanan yang pada akhirnya menyebabkan korban terus bertambah karena kelaparan.

Penelitian yang kedua diambil dari *Journal of Muslim Minority Affairs* dan diterbitkan oleh *Routledge Taylor & Francis Group*. Penelitian kedua ditulis oleh Nehginpao Kipgen dengan judul *Conflict in Rakhine State in Myanmar Rohingya Muslims Conundrum*. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan ketegangan yang dialami oleh kedua etnis, yaitu etnis Rakhine dan etnis Rohingya, terutama konflik tahun 2012 yang menyebabkan rusaknya bangunan tempat tinggal dan juga terjadinya perusakan tempat ibadah, sehingga banyak etnis Rohingya yang memilih untuk mengungsi ke beberapa negara tetangga. Pemerintah pusat juga telah melakukan upaya intervensi untuk mengakhiri pertumpahan darah dan menghindari korban yang berjatuhan. Selain itu, penelitian tersebut menyebutkan bahwa konflik antaretnis telah menyebabkan terhambatnya bantuan yang masuk untuk etnis Rohingya.

Penelitian yang terakhir membahas terkait dari peran organisasi internasional, yaitu *Peran Food and Agriculture*

*Organization (FAO) dalam Menangani Masalah Krisis Pangan di Republik Afrika Tengah 2014-2016* yang ditulis oleh Moh. Rafiul Rahman dari Universitas Mulawarman. Penelitian ini menjelaskan bahwa peperangan dan kerusakan lahan pertanian mengakibatkan krisis pangan dan kelaparan yang terjadi di Republik Afrika Tengah karena kurangnya pasokan makanan atau ketersediaan bahan makanan bagi masyarakat ketika konflik terjadi. Hampir satu juta orang mengungsi ke luar Republik Afrika Tengah untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga. Selain itu, jumlah orang kelaparan meningkat dua kali lipat dalam setahun, Konflik dan ketidakamanan tersebut telah menyebabkan terbatasnya akses dan ketersediaan makanan. Dengan adanya kasus kelaparan yang diakibatkan krisis pangan, pada akhirnya membuat pemerintah Republik Afrika Tengah meminta bantuan FAO untuk melakukan intervensi dengan ikut terlibat dalam produksi tanaman pangan dan menilai keseluruhan ketahanan pangan yang ada di Republik Afrika Tengah. Dalam penelitian tersebut dibahas pula tentang bagaimana peranan organisasi internasional ini dapat memberikan pengaruh dalam menangani krisis pangan di kawasan Afrika Tengah.

Berbeda dari ketiga penelitian di atas, penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh keterlibatan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian pascakonflik krisis pangan etnis Rohingya di Myanmar. Pasca-konflik tahun 2012 telah menyebabkan etnis Rohingya mengalami kelaparan dan korban yang terus bertambah. Penelitian ini akan dianalisis dengan memakai konsep peranan organisasi internasional, diantaranya adalah bahwa FAO tumbuh karena adanya suatu kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat antar-bangsa sebagai wadah serta alat untuk dapat melaksanakan kerja sama internasional. Sarana ini juga dilakukan untuk mengkoordinasikan kerja

sama antarnegara dan antarbangsa untuk mencapai tujuan bersama-sama. (Perwita & Yani, 2005 : 91).

Terbentuknya tujuan dan kegiatan organisasi internasional menunjukkan bahwa organisasi sesuai bidangnya masing-masing melihat pada orientasi dan hubungan kerja sama antaranggota untuk menurunkan tingkat konflik. Pada dasarnya, organisasi internasional memiliki beberapa peran khusus yang membedakannya dengan institusi-institusi lainnya. FAO merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang pertanian dan pangan untuk mengatasi krisis pangan suatu di dalam suatu wilayah sehingga ketika terjadinya suatu krisis, maka menjadi peran dari FAO dalam menanggulangnya.

### **Peran Organisasi Internasional dan Keamanan Pangan**

Pada dasarnya, peran (*role*) didefinisikan sebagai seperangkat pola perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam sistem sosial (Ribbins, 2001: 227). Menurut Lisbeth Agestam, terdapat empat peran dari organisasi, yaitu organisasi internasional mempunyai peranan sebagai *role expectation*, *role conception*, *role performance*, dan *role set*. Di dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana FAO menjadi *role performance* dalam menggunakan strategi dan pengaruhnya terhadap peningkatan produktivitas pertanian pascakonflik Krisis pangan etnis Rohingya di Myanmar.

Selain menjalankan perannya, *food security* menjadi instrumen yang sangat penting dalam mencegah krisis pangan di suatu wilayah. Menurut FAO, cara untuk dapat menanggulangi krisis pangan yang terjadi di suatu wilayah adalah dengan melihat empat faktor. Faktor pertama, *food availability*. Artinya, harus ada ketersediaan jumlah pangan secara fisik yang cukup dan harus tersedia baik level produksi, cadangan, maupun dapat dengan mudahnya diperoleh di pasar yang terdiri dari

berbagai bahan makanan dan kebutuhan pokok yang berkualitas, dengan cara melakukan pasokan produksi di dalam ataupun dari luar (termasuk bantuan pangan). Kedua adalah *food access*. Artinya, adanya akses oleh individu dalam pengelolaan sumber daya yang dianggap dapat bermanfaat dan memadai dengan berdasarkan hak-hak mendapatkan akses memperoleh makanan dan kebutuhan pokok yang mengandung gizi yang baik. Faktor ketiga adalah *utilization*. Artinya, pemanfaatan pangan yang dianggap dapat terpenuhi ketersediannya dan juga memberikan manfaat terhadap kebutuhan utama, seperti air bersih, sanitasi, dan perawatan kesehatan, dengan pemenuhan gizi yang dapat tercukupi. Instrumen lainnya yang perlu diperhatikan adalah melihat kesejahteraan masyarakat yang mana hal tersebut menjadi kebutuhan fisiologis yang terpenuhi. Yang terakhir adalah *stability*: yang artinya bahwa kebutuhan makanan tersebut sudah sangat terjamin dan memiliki keadaan yang stabil, terutama terhadap populasi di lingkup rumah tangga ataupun individu. Selain itu juga turut ikut mengantisipasi yang mungkin menjadi resiko dari kehilangan akses terhadap pangan (misalnya adanya krisis ekonomi atau iklim) atau kejadian siklus (misalnya kerawanan pangan yang terjadi musiman).

Awalnya konsep dari *food security* ini berfokus terhadap ketersediaan pangan di tingkat nasional maupun internasional. Namun, sejak tahun 1980-an, konsep ini kemudian bergeser terhadap ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga karena telah ditemukan berbagai fakta bahwa ketersediaan stok pangan di dalam tingkat global maupun nasional sama sekali tidak menjaminkannya *food security* di tingkat rumah tangga (*individual*). Pergeseran ini pada akhirnya dikembangkan oleh Amartya Sen pada tahun 1981 yang menggarisbawahi kemampuan dalam mengakses pangan yang sangat bergantung terhadap aset milik individu, seperti daya berproduksi dan menjual hasil produksinya itu (Hart, 2009).

Kondisi *Food security* di Myanmar pada dasarnya masih dalam tahap pembangunan dan perbaikan terhadap sektor pertanian, karena negara ini masih dihadapkan permasalahan etnis, iklim, dan bencana alam. Hal itu pada akhirnya menghambat produktivitas pertanian di Myanmar, khususnya di wilayah Rakhine. Wilayah ini merupakan wilayah yang telah ditinggali oleh etnis Rohingya dan Rakhine. Konflik tersebut mengakibatkan wilayah ini menjadi kurang produktif dan memberikan efek terhadap *food security* di Myanmar, mulai dari ketersediaan, akses, pemanfaatan, serta stabilitas, yang pada akhirnya menciptakan produksi tidak merata di wilayah Rakhine.

*Food availability* di wilayah ini, awalnya masih belum menjadi penghalang bagi Myanmar karena wilayah ini memiliki potensi area sawah yang bisa meningkatkan kebutuhan di Myanmar. Namun, sering terjadinya konflik mengakibatkan ketersediaan pangan makin berkurang, serta akses makanan untuk masuk ke wilayah tersebut sangat sulit. Di sini muncul harapan dengan peran dari FAO yang berupaya mengatasinya agar tidak bertambahnya korban (FAO, 2019).

### **Metode Penelitian**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang berupaya menggambarkan secara jelas fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Teknik pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara induktif melalui penelusuran studi pustaka (*Library Research*) berita dan media internet yang dikeluarkan oleh situs resmi pemerintah Myanmar maupun dari FAO. Penulis kemudian melakukan analisis dengan teori organisasi internasional *Role performance* yang diutarakan oleh Lisbeth Agestam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Krisis Pangan Etnis Rohingya Pasca-Konflik**

Kelompok-kelompok etnis secara khusus terbentuk karena adanya kesamaan kultural tertentu, seperti bahasa, agama, sejarah, serta kampung halaman yang sama. Anggota kelompok ini juga pada dasarnya selalu mengklaim mempunyai asal-usul biologis yang sama. Artinya, terdapat ikatan etnis yang lebih didasarkan pada kesamaan budaya, terlepas dari apakah mereka mempunyai ikatan satu sama lain (Fitrah, 2014). Namun, di satu sisi, isu etnis dan identitas ini menyebabkan sebuah konflik, khususnya terhadap etnis minoritas. Pada dasarnya konflik isu minoritas ini sering kali ditangani dengan cara melalui pendekatan kekerasan dan pada umumnya konflik tersebut yang terjadi di seluruh dunia disebabkan oleh cara penanganan yang dilakukan dengan kekerasan dalam penyelesaiannya, sehingga pada akhirnya dapat muncul menjadi aksi balas-membalas sebagai respon terhadap perlakuan yang diterima oleh mayoritas maupun minoritas (Fathoni, 2017).

Pecahnya konflik antara Muslim Rohingya dan Buddha dari etnis Rakhine yang terjadi di tahun 2012 menjadi berita utama di tataran dunia internasional. Hal tersebut berawal dari adanya pemerkosaan seorang wanita Buddhis oleh pria Muslim di bulan Mei, yang menyebabkan pembalasan oleh etnis Rakhine. Peristiwa tersebut telah menyebabkan kekerasan eksplosif dan korban yang besar dengan lebih dari 200 orang yang meninggal dunia. Para pengungsi Rohingya dipaksa untuk keluar dari rumah mereka. Terjadi pembatasan dalam hal pekerjaan dan kebebasan beragama. Serangan di tahun 2012 tersebut juga telah dianggap sebagai pembersihan etnis karena peristiwa tersebut telah menimbulkan banyak korban yang di alami oleh etnis Rohingya (Ula, 2017).

Selain itu, banyak tempat tinggal serta tempat ibadah yang hancur pasca-konflik

tersebut sehingga menyebabkan lebih dari 140.000 etnis Rohingya terlantar dan memilih mengungsi ke beberapa negara tetangga yang tersebar di beberapa titik, diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Thailand dan Bangladesh. Hal tersebut menjadi masalah karena terjadinya penumpukan pengungsi di negara penerima (Brooten & Verbruggen, 2017).

Kejadian tersebut menjadikan pelanggaran HAM yang besar di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi regional yang dibentuk di kawasan Asia Tenggara dinilai telah gagal dalam memainkan peranannya karena ASEAN tidak mampu menekan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan kasus tersebut. Organisasi ini juga terganjal prinsip non-intervensi sehingga konflik berlangsung berlarut-larut dan tidak kunjung selesai (Rachmawati, 2017).

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon memperingatkan bahwa konflik tersebut merupakan bagian dari krisis kemanusiaan karena etnis Rohingya mengalami keadaan darurat yang sangat kompleks, yang mana telah timbul rasa ketidaknyamanan dalam beraktivitas karena rentan akan diskriminasi dan kekerasan. Selain itu juga faktor kesehatan sangat memprihatinkan. Indeks kesehatan di Myanmar buruk dan kekurangan gizi tersebar luas. Hal tersebut terjadi terhadap kelompok etnis minoritas Rohingya. Jumlah anak-anak Rohingya yang mengalami gizi buruk baik di Myanmar maupun di Bangladesh terus mengalami peningkatan yang drastis dari tahun ke tahun. Sebuah survei baru-baru ini dari Komite Penyelamatan Internasional (IRC) bekerja sama dengan Aksi Melawan Kelaparan (ACF) menyatakan, mereka menghadapi peningkatan angka gizi buruk 10 kali lebih tinggi dibandingkan jumlah tahun lalu. Ketersediaan serta akses yang sangat sulit menjadi pemicu gizi buruk ini yang terus mengalami peningkatan.

Jumlah ini juga terus meningkat akibat pasca-konflik yang terjadi di tahun 2012. Kondisi tersebut telah menempatkan

harus adanya upaya dalam penyelamatan dan telah ditemukan sekitar 40 ribu anak Rohingya berusia antara enam bulan dan lima tahun membutuhkan bantuan (Republika, 2017).

Hal tersebut dialami juga oleh anak-anak yang mencakup 40% dari seluruh jumlah pengungsi dan sangat rentan terhadap dampak kelaparan jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat muda yang sehat. Anak balita banyak yang meninggal karena infeksi. Banyak juga efek yang terlihat ketika seseorang kekurangan gizi diantaranya adalah melemahnya otot dan menyebabkan imunitas rendah apalagi anak-anak yang rentan akan berbagai penyakit lain. Selain itu juga anak yang kekurangan gizi dapat dengan mudahnya terkena diare atau pneumonia yang harus dirujuk untuk di bawa ke rumah sakit terdekat. Oleh karena itu, hal tersebut dianggap sangat memprihatinkan. Dibutuhkan upaya agar krisis pangan dan kelaparan tidak dialami oleh etnis ini dan memperkecil keadaan agar tidak berjatuhnya korban.

### **Awal Mula Masuknya *Food and Agriculture Organization (FAO)* Dalam Mengatasi Krisis Pangan di Myanmar**

Myanmar mulai bergabung menjadi anggota FAO sejak tanggal 11 September 1947. Kantor Perwakilan FAO telah di resmikan di Myanmar pada tahun 1978. Organisasi ini masuk berawal dari adanya kerja sama yang ingin dijalin di dalam sektor pertanian. Kerja sama terjalin untuk meningkatkan kapasitas pertanian di Myanmar karena Myanmar memiliki sumber daya alam potensial di berbagai wilayah. Kerja sama tersebut sudah berlangsung hampir lebih dari 40 tahun.

Selain itu juga cakupan geografis FAO di Myanmar sangat menunjang dalam pengelolaan FAO. Pemerintah Myanmar juga mulai memiliki beberapa strategi serta proyek di berbagai mulai dari daerah Delta, Zona Kering, Rakhine, Chin, Kachin dan

Negara Bagian Shan (United Nations in Myanmar, 2018).

Negara ini juga menerima penghargaan dari PBB karena secara dramatis telah memangkas jumlah orang kelaparan dengan tenggat waktu yang cukup singkat di tahun 2015. Myanmar adalah salah satu dari 72 negara untuk mencapai target dalam *Millennium Development Goal* (MGD), yaitu mengurangi separuh proporsi orang yang kelaparan, atau membawanya di bawah ambang lima persen (FAO, 2015).

### ***Role Performance Keterlibatan Food and Agriculture Organization (FAO) dalam Mengatasi Krisis Pangan di Myanmar***

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara untuk meningkatkan produksi dan pendapatan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi para petani, peternak, dan nelayan. Selain itu juga dengan adanya pembangunan di dalam sektor pertanian tersebut dapat memperluas lapangan pekerjaan masyarakat sehingga dapat ikut terlibat dalam meningkatkan nilai ekspor yang tinggi (Siringo & Dauly, 2014).

Sektor ini juga dianggap dapat mengurangi kemiskinan karena sudah hampir 193 negara sudah melakukan berbagai tindakan 15 tahun ke depan dalam mengurangi kemiskinan pada tahun 2016-2030 di sektor pertanian. Pertanian menjadi hal utama dalam mengatasi kelaparan dan kemiskinan karena kedua hal tersebut berhubungan satu sama lain. FAO juga melakukan berbagai kegiatan yang berfokus pada akar penyebab kemiskinan dan kelaparan lalu menerapkan perubahan mendasar dan struktural yang dapat memastikan keberhasilan jangka panjang untuk mengakhiri krisis pangan maupun kemiskinan yang di alami oleh negara negara di dunia khususnya adalah negara Myanmar.

Pemerintah Myanmar dan FAO telah berkoordinasi dalam menjalin kerja sama ke dalam 7 bidang prioritas selama periode

(2013-2016) ke 7 prioritas tersebut meliputi: produksi pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan keamanan dan kualitas pangan, pengelolaan sumber daya alam dan juga pengeolaan lingkungan yang berkelanjutan, penggunaan dan pengelolaan lahan, prioritas pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan yang terakhir adalah prioritas perbaikan dalam pembangunan penghidupan pedesaan serta Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dalam penanggulangan perubahan iklim.

Kerja sama tersebut terus terjalin dan negara ini mulai gencar -gencarnya dalam melakukan perang terhadap kelaparan. Kemiskinan juga menjadi masalah karena menyebabkan tingkat kebutuhan makanan pada akhirnya tidak terpenuhi akibat harga makanan yang terbilang cukup mahal. Negara ini juga rentan terhadap bencana alam yang pada akhirnya menghambat produktivitas pangan di Myanmar. FAO juga memberikan dukungannya terhadap peningkatan produktivitas pertanian di Myanmar dengan cara memprioritaskan pembaharuan dan produktivitas petani dalam skala kecil dengan tujuan untuk dapat meningkatkan akses makanan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan makanan dengan cara membangun kembali produksi agar meningkatkan ketersediaan makanan di wilayah konflik khususnya di wilayah Rakhine.

Wilayah ini rawan terhadap bencana alam, seperti banjir juga telah menyebabkan terhambatnya aktivitas para petani yang masih menggunakan cara yang tradisional terutama di bidang beras yang ketika itu menjadi produk unggulan di Myanmar. Rakhine juga menjadi salah satu wilayah unggulan untuk produksi beras karena menjadi wilayah yang potensial namun akibat wilayah yang rawan konflik dan bencana alam pada akhirnya diperkirakan menurunkan 15% produksi padi dan juga menghambat akses masuk di

wilayah Rakhine. Keprihatinan juga terjadi di pedesaan Rakhine, terutama ketika adanya ketergantungan terhadap bantuan makanan yang masuk. FAO dan Myanmar mulai melakukan kerja sama dalam meningkatkan produktivitas di sektor pertanian melalui pelatihan terhadap para petani dan mulai melakukan upaya agar produktivitas tersebut dapat semakin meningkat.

FAO dan pemerintah Myanmar mulai melakukan pelatihan terhadap para petani di Rakhine dengan teknik-teknik baru untuk meningkatkan hasil yang signifikan dan juga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan lingkungan termasuk perubahan iklim dan persiapan penanganan pertanian pascabencana alam. Lebih dari 26.000 petani telah menerima sekitar 200 ton benih berkualitas tinggi dan lebih dari 500 ton pupuk. FAO juga menyediakan paket sayuran yang terdiri dari labu pahit, okra, kacang panjang dengan di berikannya juga pupuk sebanyak 25 kg pelatihan ini juga dihadiri oleh para ahli agronomi dan ahli gizi FAO untuk memberikan kesadaran pertanian dan gizi di wilayah yang rawan akan krisis (FAO, 2018). Para petani yang ikut dalam pelatihan tersebut telah menerima manfaatnya karena memunculkan kesadaran bagi para petani bahwa sektor pertanian menjadi hal yang sangat penting karena berhubungan dengan proses peningkatan kesadaran nutrisi yang secara langsung dapat dimaksimalkan terhadap produktivitas pertanian yang dapat didistribusikan.

Benih tanaman yang memiliki kualitas tinggi juga telah dikirimkan oleh FAO melalui proyek yang turut didanai oleh pemerintah Jepang, seperti padi, kacang tunggak, kacang tanah dan gram hitam. Hal tersebut dilakukan sebagai bantuan distribusi terhadap konflik dan dampak dari banjir di wilayah tersebut. Pada tahun 2015 dan 2016 para petani juga telah menerima lebih dari 5.000 set alat dan perlengkapan sayur, diantaranya

adalah mengandung lobak putih, kacang panjang, dan biji labu agar menjadi lebih produktif dan mengurangi ketergantungan dari luar

FAO juga mencari tambahan pendanaan sebesar US \$ 5,1 juta yang akan membantu menjangkau 87.000 petani dalam memberikan pelatihan program penanaman baru yang dikenal sebagai *system of rice intensification* (SRI) teknik ini pada dasarnya telah dikembangkan pertama kali di awal tahun 1980-an oleh *French priest dan Fr. Henri de Laulanie, S.J* di Madagascar dan sudah di kembangkan oleh beberapa negara. *System of Rice Intensification* (SRI) merupakan salah satu teknik budidaya tanaman padi yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas padi terhadap pengelolaan tanaman, air dan unsur hara. Metode ini dapat digunakan untuk mengembalikan kesuburan tanah dengan memanfaatkan kembali mikro-organisme tanah sebagai penyedia dalam produk mernabolit terhadap nurtisi dari tanaman. Melalui metode ini juga diharapkan kelestarian lingkungan dapat terjaga dengan baik dan terbebas dari zat kimia berbahaya. Teknik SRI ini dianggap sangat efektif dan sudah banyak dilakukan di negara negara di Asia Tenggara dan dianggap dapat efektif juga jika diterapkan di Rakhine pusat di Myanmar untuk dapat meningkatkan hasil panen.

Teknik dari SRI ini dilakukan dengan teknik transplantasi yang menyisakan jarak 25 hingga 30 sentimeter (10 hingga 12 inci) antara tanaman padi untuk mendorong pertumbuhan bebas. Alat utama yang dibutuhkan untuk SRI adalah penanda baris yang menciptakan kisi kotak kecil di seluruh plot. Bibit padi muda ditanam hanya di sudut-sudut setiap kotak. Metode ini dianggap dapat menghemat tenaga dan benih yang akan di tanam. Metode ini juga dianggap sangat efektif dalam mengurangi biaya input dapat berdampak besar pada profitabilitas petanian. Pelatihan ini juga dianggap

relevan karena pada umumnya banyak petani yang memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga ketika adanya sosialisasi dan pelatihan tersebut dapat memberikan langkah demi langkah bagaimana metode baru ini bekerja dengan hasil yang baik dibandingkan dengan cara tradisional. Selain itu juga dalam pelatihan ini juga ikut melibatkan organisasi dan komunitas lain, seperti *Livelihoods and Food Security Trust Fund* (LIFT) (FrontierMyanmarNews, 2017).

### **Pengaruh Keterlibatan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian Pasca-Konflik Krisis Pangan Etnis Rohingya di Myanmar**

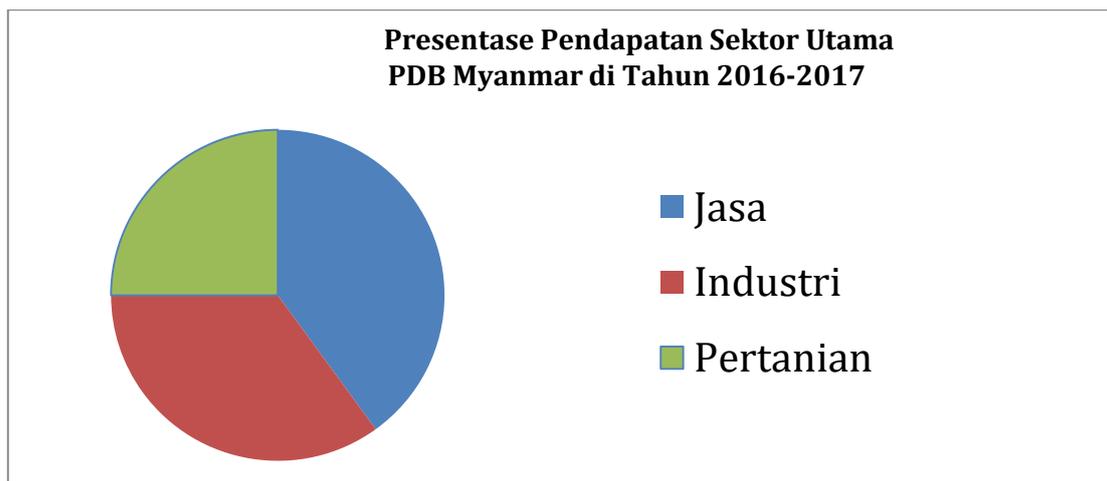
Keterlibatan FAO dalam peningkatan produktivitas pertanian di Myanmar memberikan dampak dan pengaruh yang cukup besar. Sektor pertanian yang dapat dikembangkan dengan lebih besar dianggap juga dapat meningkatkan pendapatan nasional maupun mengurangi kelaparan di negaranya. Selain itu sektor ini menawarkan berbagai peluang paling signifikan untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Wilayah Rakhine yang ditempati oleh etnis Rohingya dan etnis Rakhine menjadi wilayah yang potensial, Walaupun wilayah ini menjadi wilayah yang selalu berkonflik, wilayah ini juga menjadi wilayah yang rawan akan bencana alam, termasuk angin topan, badai, banjir, dan tanah longsor yang semakin memperburuk akses serta ketersediaan di wilayah ini. Pada tahun 2010, wilayah Rakhine terkena dampak banjir dan tanah longsor yang pada akhirnya membuat ribuan keluarga mengungsi karena adanya kerusakan parah, khususnya di kota-kota Buthidaung dan Maungdaw. Selain itu juga jembatan dan jalan-jalan di sana mengalami kerusakan yang parah dan hancur total sehingga membatasi akses bantuan untuk ke daerah yang terkena dampak dari bencana tersebut. Wilayah Rakhine Utara

menjadi daerah yang multi-etnis dengan mayoritas etnis agama Buddha di selatan dan mayoritas penduduk muslim Rohingya adalah sekitar 90% dan hampir sekitar 90% juga tinggal di daerah pedesaan yang cenderung padat penduduk. Wilayah Rakhine ini pada akhirnya mulai dioptimalkan oleh FAO dan Myanmar melalui pergerakan baru dalam menghindari krisis pangan dan untuk menekan angka pendapatan nasional dengan cara memperbaiki infrastruktur yang kurang memadai dan memanfaatkan produktivitas pertanian di negaranya.

Negara ini mulai melakukan gerakan reformasi pertanian ketika di zaman pemerintahan Thein Sein. Salah satunya adalah dengan cara menyelenggarakan serangkaian seminar nasional dalam reformasi ekonomi di Myanmar yang dilakukan khususnya dalam sektor pertanian. Seminar itu juga pada akhirnya menampung berbagai keluhan dan saran dari masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian agar kerawanan pangan dapat dihentikan. Pada pertemuan itu juga pada akhirnya mulai dikembangkan infrastruktur di daerah pedesaan dan masalah penyediaan akses yang terjangkau dalam proses input di sektor pertanian.

Beberapa pertemuan lain melibatkan berbagai kerja sama dengan beberapa pihak dari institusi-institusi multilateral, biro-biro untuk pembangunan, dan juga sejumlah investor asing yang potensial. Hal tersebut terbukti ketika sektor pertanian ini telah menyumbangkan sebagian dari pendapatan nasional sebesar 25% dari Myanmar sehingga sektor pertanian kini mulai dikembangkan oleh pemerintah Myanmar dengan cara melibatkan FAO untuk memperbesar produktivitas dan kapasitas dari pertanian di Myanmar. Berikut adalah uraian pendapatan sektor utama PDB Myanmar, termasuk sector pertanian:



Sumber: Myanmar Statistical Yearbook, 2017,

**Gambar 1**  
Presentase Pendapatan GDP Sektor di Myanmar

**Tabel 1**  
Presentase berbagai sektor dalam kontribusi pendapatan GDP di Myanmar

Sektor dan Sub-Sektor	2015-2016	Pembagian total PDB	2016-2017	Pembagian total PDB
Pertanian	13,417,668,2	18,5%	13,736,113,2	17,2%
Ternak dan Perikanan	5,906,519,1	8,1%	6,505,195,6	8,2%
Kehutanan	142,649,5	0,2%	58,726,8	0,2%
<b>Pertanian</b>	<b>19,466,836,8</b>	<b>26,80%</b>	<b>20,300,035,6</b>	<b>25,60%</b>
Energi	3,687,516,1	5,1%	2,669,961,3	3,3
Pertambangan	759,981,8	1,0%	835,279,5	1,0
Pengelolaan/manufaktur	15,130,436,7	20,8%	18,167,436,6	22,8%
Daya Listrik	1,030,836,9	1,5%	1,111,243,5	1,4%
Pembangunan	4,454,894,5	6,1%	5,133,917,1	6,4%
<b>Industri</b>	<b>25,063,666,0</b>	<b>34,50%</b>	<b>27,917,838,0</b>	<b>34,90%</b>
Transportasi	8,239,652,8	11,3%	8,948,034,7	11,2%
Komunikasi	1,512,271,1	2,1%	1,638,899,7	2,1%
Lembaga Keuangan	173,401,9	0,2%	233,833,0	0,3%
Sosial/jasa administrasi	2,686,743,5	3,7%	2,806,426,9	3,5%
Sewa dan jasa lainnya	1,812,108,0	2,5%	2,159,037,1	2,7%
Perdagangan	13,759,341,1	18,9%	15,716,792,9	19,7%
<b>Jasa</b>	<b>28,183,518,4</b>	<b>38,70%</b>	<b>31,503,024,3</b>	<b>39,50%</b>

Sumber: Myanmar Statistical Yearbook 2017.

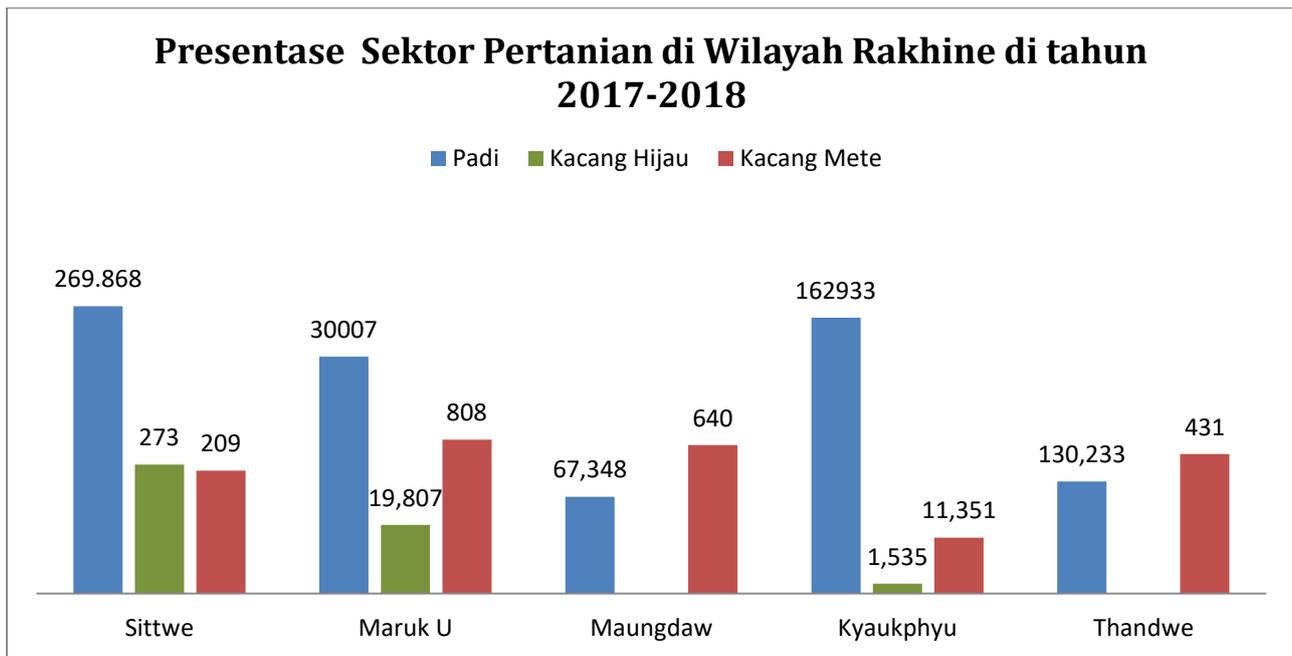
Pasca-konflik yang terjadi terhadap etnis Rohingya dan Rakhine, produktivitas di wilayah Rakhine mulai

dikembangkan dan dibudidayakan dengan luas, seperti penanaman cabai bawang dan kacang-kacangan termasuk matpe (gram

hitam), pedisein (gram hijau), bocatepe (kacang polong), pegyi (kacang lablab), pelun, pesigon (kacang pigeon) dan gram (kacang ayam). bocapepe (cow pea) dan matpe (black-gram). Peningkatan produktivitas dilakukan terutama di kota Mrauk U Kyauktaw dan Minbya. Selain itu juga FAO dan pemerintah mulai mengoptimalkan cara mengembangkan pertanian di wilayah Rakhine karena wilayah ini dianggap memiliki potensi sumber daya alam dan lebih dari 18% dari total luas lahan dapat ditanami. Namun, kenyataannya, hanya sekitar 14% yang digunakan di wilayah ini. Dengan adanya bekal dari pelatihan, para petani mulai menggunakan mesin pertanian secara modern dan juga mulai menggunakan benih berkualitas untuk tingkat hasil dan produktivitas yang lebih tinggi. Pemerintah juga mulai melakukan perbaikan infrastruktur dengan harapan dapat meningkatkan optimalisasi produk. FAO juga mendorong masyarakat agar dapat memproduksi pertanian selama musim kemarau dan juga agar dapat mengurangi risiko, termasuk memfasilitasi akses bahan tanam dan air berkualitas untuk meningkatkan produksi dan mengurangi dampak kekeringan. Pemerintah juga membuat struktur penanggulangan banjir

secara cepat karena secara umum Myanmar merupakan negara yang memiliki tingkat bahan makanan pokok yang dapat menghasilkan antara 55 dan 60 juta ton per tahun.

Keterlibatan FAO juga menjadi salah satu penunjang dalam peningkatan pertanian di Myanmar dan dapat berdampak dalam mengurangi kelaparan yang melanda di negara Myanmar. Hal tersebut terbukti dari laporan FAO bahwa Myanmar juga menjadi salah satu dari 72 negara yang telah mencapai target dalam *Millennium Development Goal* (MGD) yaitu mengurangi separuh proporsi orang yang kelaparan, atau membawanya di bawah ambang lima persen di tahun 2015. Artinya, tindakan yang telah dilakukan telah membawa dampak perubahan yang signifikan setelah adanya keterlibatan FAO dalam menjalankan perannya di Myanmar. Selain itu, wilayah Rakhine yang ditempati oleh etnis Rohingya juga telah mengutamakan penanaman padi, kacang hijau, dan kacang mete yang dianggap memiliki potensi dalam mengatasi kelaparan dengan meningkatkan beberapa kapasitas di titik kota wilayah Rakhine. Presentase sektor pertanian di beberapa wilayah Rakhine dapat dilihat dalam gambar dan tabel di bawah ini:



Sumber: Biyearly Report, 2018.

**Gambar 2**  
Presentase Sektor Pertanian di Wilayah Rakhine

**Tabel 2**  
Presentase Produksi Padi, Kacang Hijau, dan Kacang Mete dalam Sektor Pertanian di Wilayah Rakhine

No.	Wilayah	Padi	Kacang Hijau	Kacang Mete
			(Hektar)	
1	Sittwe	269,868	273	209
2	Maruk-U	300,070	19,807	808
3	Maungdaw	67,348	-	640
4	Kyaukphyu	162.933	1,535	11,351
5	Thandwe	130,233	-	431
	<b>Total</b>	<b>930,452</b>	<b>21,615</b>	<b>13,439</b>

Sumber: Biyearly Report, 2018.

FAO juga telah memberikan dampak positif terhadap Rohingya dalam produktivitas pertanian di wilayah Rakhine. Mereka mendapatkan bantuan pangan untuk 98.300 orang yang terkena dampak konflik dari 187 desa Muslim Rakhine, Budha, dan Hindu, di kota Buthidaung dan Maungdaw, negara bagian Rakhine utara. FAO juga ikut mendukung keamanan dan pemulihan mata

pencaharian Rohingya terhadap 19,363 rumah tangga di 11 kota Rakhine, sehingga etnis ini mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian, karena selama ini etnis Rohingya masih memiliki keterbatasan dalam bergerak dan mata pencahariannya pun masih sangat sulit untuk di temukan oleh Rohingya. Selain itu, saat ini di lingkup rumah tangga di Rakhine jumlah benih tanaman dan pupuk terus

dikirim ke setiap rumah tangga agar cukup untuk menanam 2 hektar tanah. Hal tersebut merupakan upaya lain yang dilakukan FAO agar adanya peningkatan produktivitas di lingkup rumah tangga di wilayah Rakhine, termasuk bagi etnis Rohingya, agar ketersediaan bahan pangan terpenuhi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa keterlibatan organisasi internasional *Food and Agriculture Organization* (FAO) dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian di Myanmar, terutama dalam mengurangi tingkat kelaparan terhadap etnis Rohingya. Akibat konflik, akses

serta ketersediaan yang kurang di wilayah tersebut pada akhirnya menyebabkan etnis Rohingya mengalami krisis pangan dan kelaparan. Namun, dengan adanya peran dari FAO, produktivitas pertanian mulai meningkat, sehingga bermanfaat untuk menghilangkan krisis pangan dan kelaparan. FAO telah berperan dalam meningkatkan kapasitas serta pengembangan di sektor pertanian sehingga juga memperkecil ketergantungan terhadap bantuan yang datang dari luar. Peran dan posisi organisasi internasional seperti FAO dianggap semakin penting karena menjadi organisasi yang dapat membantu pemerintah Myanmar dalam mengurangi krisis pangan dan kelaparan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Perwita, A. B., & Yani, Y. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Smith. (2010). *Burma: Insurgency and The Politics Of Ethnicity*. New York: Zed Books.
- Susetyo, H., Aryanto, H., & Wasti, R. M. (2013). *Rohingya Suara Etnis yang Tidak Boleh Bersuara*. Jakarta: PAHAM Indonesia.

### Jurnal

- Brooten, L., & Verbruggen, Y. (2017). Producing the News: Reporting on Myanmar's Rohingya Crisis. *Journal of Contemporary Asia*, 47(3), 440-460.
- Fathoni, Mochamad. (2017). Relevansi Maqasid Syariah Sebagai Pendekatan Baru Diplomasi Islam Dalam Penyelesaian Konflik Minoritas: Teori dan Praktik. *Insignia Journal of International Relations*, 4(1), 36-52.
- Fitrah, Elpeni (2014) *Politik Identitas dalam Sejarah Pembentukan Negara Israel*, *Insignia Journal of International Relations*, 1(1), 84-99.
- Hart, T. (2009). Exploring definitions of food insecurity and vulnerability to refocus assessments. *Agrekon* 48(4), 362-383.
- Mohajan, H. K. (2018). History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims. *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 2(1), 19-46.
- Rachmawati, Tety. (2017). Menakar Stabilitas Bagi Penyelesaian Konflik Rohingya. *Dauliyah Jurnal of Islamic and International Affairs*, 2(1), 97-118.
- Rahman, M. R. (2017). Peran Food And Agriculture Organization (FAO) Dalam Menangani Masalah Krisis Pangan di Republik Afrika Tengah 2014-2016. *Universitas Mulawarman*.
- Siringo, H. B., & Daulay, M. (2014). Analisis Keterkaitan Produktivitas Pertanian dan Impor Beras di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(8), 488-499.
- Ula, Syarifatul. (2017). *Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar*. *Journal of International Relations*, 3(3), 19-28.

### **Makalah dan Dokumen Resmi**

Alfi. (2013). *Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar Tahun 2012*. Jember: Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember.

Biyearly Report. (2018), *General Administration Department*, Rakhine State.

FAO. (2019), *The 2018 FAO/WFP Agriculture And Food Security Mission To Rakhine State Myanmar*. Food And Agriculture Organization of The United Nations World Food Programme.

Statistical Yearbook. (2017). *Central Statistical Organization*. Ministry of Planning and Finance.

### **Internet**

FAO. (2015). "FAO what we do." Diakses dari <http://www.fao.org/about/what-we-do/so3/en/>.

FAO. (2015). "Seventy-two countries achieve the MDG target to halve proportion of hungry people." Diakses dari <http://www.fao.org/news/story/en/item/292551/icode/>.

FAO. (2018). "UN Entities in Myanmar." Diakses dari <http://mm.one.un.org/FrontierMyanmarNews>. (2017).

"Subsistence paddy farmers in central Rakhine are slowly adopting new techniques to boost yields and adapt to social and environmental changes, including an unpredictable climate and a shortage of casual workers." Diakses dari <https://frontiermyanmar.net/en/they-will-change-if-they-see-the-change>.

Oxford Burma Alliance. (2016). "Ethnic and groups in Myanmar." Diakses dari <http://www.oxfordburmaalliance.org/ethnc-groups.html/>.

Republika. (2017). "Anak-Anak Rohingya yang Didera Gizi Buruk." Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/11/14/ozazl440-anakanak-rohingya-yang-didera-gizi-buruk>.

United Nations in Myanmar. (2018). "FAO in Myanmar." Diakses dari <http://mm.one.un.org/content/unct/myanmar/en/home/who-we-are/fao/>.